

**TELAAH IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA MELALUI METODE
EVALUASI**

M. Ridwan¹, Marshela Tri Desta Damayanti², M. May diansah³

UIN Raden Fatah Palembang^{1,2,3}

e-mail: : 23041070259@radenfatah.ac.id¹, 23041070260@radenfatah.ac.id²,
23041070273@radenfatah.ac.id³

ABSTRAK

Kurikulum Merdeka merupakan trobosan terbaru dalam pilar pendidikan yang diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pendidikan di Indonesia, didalam implementasi kurikulum merdeka banyak sekali pencapaian dan kendala yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi para pelaksana kurikulum yaitu kepala sekolah, guru, dan parlementer pendidikan. Diberbagai jenjang pendidikan implementasi kurikulum merdeka memiliki beragam tantangan dan kendala, salah satunya adalah kurangnya pelatihan yang insentif terhadap guru didalam penerapan kurikulum merdeka dibeberapa institusi pendidikan. Evaluasinya berupa upaya kebijakan pemerintah untuk memberikan pemerataan terhadap support yang diberikan berupa esensi dan material sehingga tercapai pemahaman yang komprehensif terhadap para pelaksana kurikulum dalam administrasi dan pelaksanaannya terhadap implementasi kurikulum. Dalam upaya penulisan artikel ini, kami sebagai penulis menggunakan metode *library research*, yaitu berupa riset yang dilakukan melalui ekplorasi beberapa informasi berupa jurnal, artikel dan buku-buku terkait pembahasan, kami sebagai penulis mengharapkan karya tulis berupa artikel ini dapat membantu para akademisi dalam memperluas cakrawala pengetahuan dan penguatan terhadap suatu informasi yang relevan dengan situasi kurikulum saat ini.

Kata Kunci: *Kurikulum Merdeka, Implementasi Kurikulum Merdeka, Pelaksana Kurikulum.*

ABSTRACT

The Independent Curriculum is the latest breakthrough in the pillars of education that is expected to have a positive impact on education in Indonesia. In the implementation of the independent curriculum, there are many achievements and obstacles that can be used as evaluation materials for curriculum implementers, namely principals, teachers, and education parliamentarians. At various levels of education, the implementation of the independent curriculum has various challenges and obstacles, one of which is the lack of incentive training for teachers in implementing the independent curriculum in several educational institutions. The evaluation is in the form of government policy efforts to provide equality of support provided in the form of essence and material so that a comprehensive understanding is achieved for curriculum implementers in administration and implementation of curriculum implementation. In an effort to write this article, we as authors use the library research method, namely research conducted through the exploration of several information in the form of journals, articles and books related to the discussion, we as authors hope that this written work in the form of an article can help academics in expanding their horizons of knowledge and strengthening information that is relevant to the current curriculum situation.

Keywords: *Independent Curriculum, Implementation of Independent Curriculum, Curriculum Implementer.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Kurikulum, sebagai jantung dari sistem pendidikan, memegang peranan

Copyright (c) 2025 MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan



krusial dalam menentukan arah dan mutu pembelajaran. Namun, kurikulum yang baik di atas kertas tidak serta-merta menjamin keberhasilan implementasinya di lapangan. Kesenjangan antara rancangan ideal dan realitas praktik ini sering dijelaskan melalui konsep *fidelity of implementation*, yang menekankan bahwa keberhasilan kurikulum sangat bergantung pada bagaimana ia diterjemahkan dan dijalankan oleh para pendidik dalam konteks spesifik mereka (Mulyasa, 2013). Oleh karena itu, evaluasi kurikulum menjadi suatu keharusan untuk memastikan bahwa kurikulum tidak hanya dirancang dengan baik (validitas konten), tetapi juga terimplementasi secara efektif (validitas proses) dan mencapai tujuan yang diharapkan (validitas produk). Evaluasi yang sistematis, sebagaimana diadvokasikan dalam berbagai model seperti CIPP (Context, Input, Process, Product), membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pada setiap tahapan kurikulum (Stufflebeam & Coryn, 2014).

Pada dasarnya, tujuan kegiatan evaluasi kurikulum ditentukan berdasarkan kontrak atau kesepakatan evaluator dengan lembaga yang menggunakan jasa evaluator, sehingga tujuan evaluasi dapat ditentukan sesuai kesepakatan-kesepakatan itu. Hal ini menyoroti pentingnya kejelasan tujuan evaluasi sejak awal, apakah bertujuan *summatif* (untuk menilai hasil akhir dan akuntabilitas) atau *formatif* (untuk memberikan umpan balik guna perbaikan berkelanjutan selama proses implementasi) (Stufflebeam & Coryn, 2014). Sebagai contoh, jika evaluator suatu kajian evaluasi kurikulum menetapkan tujuan evaluasinya adalah untuk “memahami dan menjelaskan karakteristik pelaksanaannya”, maka pihak lembaga pendidikan sebagai pengembang kurikulum pada institusi tersebut hanya mendapatkan hasil evaluasi berupa deskripsi mengenai karakteristik dan pelaksanaan kurikulum (Abdurahmansyah, 2023). Sebagaimana dikemukakan Oktaria (2023), data deskriptif semacam ini mungkin tidak cukup memadai bagi pengambil keputusan (pihak lembaga) untuk menentukan apakah kurikulum tersebut perlu diganti ataukah diperbaiki, karena tidak dirancang secara eksplisit untuk menghasilkan rekomendasi tindakan.

Karena tujuan evaluasi itu tidak dihajatkan secara tegas untuk mencari data sehingga dapat dipakai untuk mengganti atau memperbaiki kurikulum, perlu dipahami spektrum tujuan evaluasi yang lebih luas. Tujuan evaluasi mencakup: 1) mengukur tercapainya tujuan dan mengetahui hambatan-hambatan dalam pencapaian tujuan kurikulum; 2) mengukur dan membandingkan keberhasilan kurikulum serta mengetahui potensi keberhasilannya; 3) memonitor dan mengawasi pelaksanaan program, mengidentifikasi permasalahan yang timbul; 4) menentukan kegunaan kurikulum, keuntungan, dan kemungkinan pengembangannya lebih lanjut; 5) mengukur dampak kurikulum bagi peningkatan kinerja sumber daya manusia pada lembaga pendidikan seperti pendidik, tenaga kependidikan, proses pendidikan, dan seterusnya. Berbagai tujuan ini mencerminkan pandangan bahwa evaluasi kurikulum idealnya bersifat komprehensif (Sudjana, 2011). Dimensi evaluasi sebagai bagian dari kurikulum dan pendidikan merupakan proses yang tidak pernah berakhir (*never ending process*). Konsep ini sejalan dengan prinsip *continuous quality improvement* (CQI) dalam pendidikan, di mana evaluasi menjadi bagian integral dari siklus perencanaan, implementasi, dan penyempurnaan kurikulum yang harus dilakukan secara terus-menerus.

Berdasarkan riset yang kami lakukan dari beberapa artikel yang kami review dengan menggunakan metode *library research* atau studi literatur, kami melalui karya tulis ini ingin menambahkan cakrawala pengetahuan para akademisi untuk lebih mengembangkan pemikiran kritis mereka terhadap implementasi Kurikulum Merdeka. Pendekatan *library research* merupakan metode yang sah untuk mensintesis pengetahuan dari berbagai sumber dan mengidentifikasi tren atau isu penting dalam suatu bidang kajian (Xiao & Watson, 2019). Temuan awal dari berbagai studi (misalnya, Cahyono et al., 2022) seringkali menyoroti adanya beberapa kendala dalam implementasi Kurikulum Merdeka, baik dari segi administrasi maupun penerapannya dalam upaya menggapai tujuan pendidikan yang holistik. Oleh karena itu, Copyright (c) 2025 MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan



evaluasi terhadap implementasi Kurikulum Merdeka tidak hanya terkait dengan penilaian keberhasilan siswa, tetapi juga perlu menilai secara kritis seberapa besar efektivitas guru dalam menerapkan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka serta tingkat *otonomi profesional* yang dapat mereka wujudkan dalam praktik pembelajaran dan pengelolaan administrasi (Sari & Putra, 2023).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research). Menurut Zed, studi pustaka memiliki sejumlah karakteristik, antara lain penelitian ini menganalisis teks secara langsung, berinteraksi langsung dengan data yang sudah ada (ready made), data yang digunakan merupakan data sekunder, serta kondisi data tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu. Metode ini melibatkan pengumpulan berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengeksplorasi informasi melalui tinjauan literatur, membaca, mengkaji, dan mencatat dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel, dan buku yang relevan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi. Keabsahan hasil analisis dilakukan dengan cara melakukan pengecekan antar pustaka dan membaca kembali pustaka tersebut

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Tujuan Kurikulum Merdeka

Salah satu elemen krusial dalam pendidikan yang sering terlupakan adalah kurikulum. Padahal, kurikulum memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Kurikulum menggambarkan visi, misi, dan tujuan pendidikan dari sebuah institusi atau lembaga pendidikan. Selain itu, kurikulum juga berfungsi sebagai inti dari nilai-nilai yang akan disampaikan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan (Khoirurrijal dkk., 2022). Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum didefinisikan sebagai “seperangkat rencana dan ketentuan tentang tujuan, isi, dan penyelenggaraan pendidikan” (UU No. 20 Tahun 2003). Bahan ajar serta metode pembelajaran yang diterapkan berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran (Abdurrahmansyah dkk., 2022).

Kurikulum Merdeka belajar merupakan kurikulum pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Kurikulum yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) adalah upaya bentuk evaluasi dari perbaikan Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 digunakan sebelum masa pandemi melanda Indonesia, dimana kurikulum 2013 merupakan kurikulum satu-satunya yang digunakan didalam proses belajar mengajar.

Kurikulum 2013 telah diterapkan mulai dari tahun ajaran 2013/2014. Penerapan ini dilakukan terutama di sekolah yang telah memiliki akreditasi (A). Penerapan Kurikulum 2013 di jenjang SMA/SMK/MA tentu sangat cocok karena kurikulum yang dirancang mengandung nilai efektif, inovatif, kreatif, serta bisa menggali potensi dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Merdeka belajar merupakan konsep dari Kurikulum Merdeka yang diterapkan dengan tujuan untuk melatih kemerdekaan dalam berpikir peserta didik. Inti paling penting dari kemerdekaan berpikir ditujukan kepada guru. Jika guru dalam mengajar belum merdeka dalam mengajar, tentu peserta didik juga ikut tidak merdeka dalam berpikir.

Guru juga memiliki target tertentu dari pemerintah seperti akreditasi, administrasi, dan lain-lain. Tentu dalam keadaan seperti ini peserta didik tidak dapat secara luwes berkembang dalam pembelajaran karena hanya terpaku pada nilai saja. Dengan adanya merdeka belajar, peserta didik dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan bakat dan minatnya karena peserta didik juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam penyerapan ilmu



yang disampaikan oleh guru. Merdeka belajar yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah jawaban terhadap keluhan dan masalah yang dihadapi oleh pendidik dalam proses pembelajaran. Dengan adanya merdeka belajar, beban dan tugas dari seorang guru lebih dimini malisir mulai dari pengadministrasian sampai pada kebebasan dari tekanan intimidasi (Khoirurrijal dkk.,2022).

2. Klasifikasi Implementasi Kurikulum Merdeka Berdasarkan Jenjang Pendidikan SD/SMP/SMA

Implementasi Kurikulum Merdeka di tingkat SD, SMP, dan SMA menunjukkan variasi yang signifikan, tergantung pada kesiapan sekolah, kapasitas guru, dan dukungan kebijakan yang tersedia. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ketiga jenjang memiliki tujuan transformasi yang sejalan secara filosofis, strategi implementasi dan tantangan yang dihadapi di lapangan sangat bervariasi.

a. Implementasi Kurikulum Merdeka di tingkat SD/MI sederajat

Di tingkat Sekolah Dasar /MI, implementasi kurikulum Merdeka menekankan keseluruhan, menghibur, pembelajaran terkait konteks melalui pendekatan tematik terintegrasi dan implementasi proyek, berdasarkan pada proyek yang berbasis berdasarkan Profil Mahasiswa Pancasila (P5). Tujuan utama dari kurikulum ini adalah untuk membangun dasar literasi siswa, jumlah dan kepribadian. Guru memiliki kebebasan untuk merancang modul pembelajaran yang memenuhi konteks lokal dan kebutuhan siswa.

Namun, banyak guru yang terpapar pada hambatan pembelajaran diferensial karena kurangnya pelatihan berkelanjutan karena terbatasnya pemahaman konsep kurikulum. Seperti yang dikatakan oleh Nurhadi (2022), "Guru sekolah dasar umumnya tidak digunakan untuk membuat modul pengajaran secara mandiri, karena mereka sebelumnya sangat bergantung pada buku paket.

Selain itu, implementasi proyek P5, yang diperlukan setidaknya dua kali setahun belum berjalan sesuai dengan tujuan karena kendala waktu dan kurangnya sinergi sesama guru. Keberhasilan implementasi kurikulum merdeka sangat dipengaruhi oleh pemimpin institusi pendidikan dan partisipasi aktif komunitas guru dalam mendesain pembelajaran yang adaptif dan selaras (Nurhadi, 2022).

b. Implementasi Kurikulum Merdeka ditingkat SMP/Mts Sederajat

Di jenjang Sekolah Menengah Pertama, Kurikulum Merdeka mulai memberikan struktur pembelajaran yang lebih sistematis, namun tetap mempertahankan prinsip fleksibilitas dan eksplorasi minat. Para guru diharapkan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, menggunakan asesmen diagnostik dan formatif, serta melaksanakan proyek P5 yang bersifat lintas mata pelajaran.

Walaupun tersedia platform Merdeka Mengajar sebagai sumber ajar dan pelatihan daring, masih banyak guru yang belum memanfaatkannya secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan waktu, dan beban administrasi yang padat. Rachmawati dan Fadillah (2023) berpendapat bahwa "Guru membutuhkan panduan konkret dan ruang kolaborasi untuk mengembangkan proyek P5 yang lintas disiplin dan berkelanjutan "(Rachmawati, N., & Fadillah, R., 2023).

Sayangnya, sifat pembelajaran kolaboratif belum sepenuhnya terwujud, karena koordinasi antara implementasi proyek ini masih lemah. Selain itu, penguatan karakter melalui aktivitas intrakurikuler dan ekstrakurikuler sering dipandang sebagai kegiatan tambahan, bukan bagian dari integral dari proses pembelajaran.

c. Implementasi Kurikulum Merdeka ditingkat SMA/MA Sederajat

Di jenjang Sekolah Menengah Atas,Kurikulum Merdeka memiliki fleksibelitas yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Peserta didik memiliki keleluasaan dalam memilih mata pelajaran untuk minat dan perencanaan di masa depan, terutama di Kelas XI.



Pendekatan ini dianggap progresif karena memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengaktualisasi diri dan berorientasi karir sejak dini.

Namun, fleksibilitas ini memiliki tantangan yang unik. Karena terbatasnya jumlah guru dan fasilitas, banyak sekolah tidak dapat menawarkan semua mata pelajaran yang mereka pilih. Selain itu, siswa masih kurang mampu memilih mata pelajaran berdasarkan minat dan bakat, yang disebabkan oleh kurangnya instruksi akademik yang sistematis.

Menurut Gunawan (2022), "mensyaratkan bahwa fleksibilitas kurikulum di tingkat sekolah menengah adalah kesediaan untuk menjadi mediator disipliner lintas kelas yang dapat membimbing siswa dalam keputusan akademik yang matang." Sayangnya, mengingat keakraban mereka dengan pendekatan terstruktur dan konten yang kaku, banyak guru tidak siap untuk mengambil peran ini " (Gunawan, 2022).

Suyatno dan Fauziyah (2023) menyatakan bahwa banyak sekolah menengah atas yang masih menerapkan Kurikulum Merdeka secara administratif, namun belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip diferensiasi dalam praktik pembelajaran di kelas. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara apa yang direncanakan dan apa yang dilaksanakan (Suyatno dan Fauziyah, 2023).

Pelaksanaan proyek P5 di tingkat SMA juga menghadapi tantangan yang sama seperti di tingkat SMP. Walaupun proyek lintas disiplin diharapkan dapat meningkatkan kompetensi abad ke-21, sering kali pelaksanaannya terhambat oleh jadwal pembelajaran yang padat dan keterbatasan dukungan manajerial dari pihak sekolah.

d. Hasil Analisis Perbandingan terhadap Implementasi Kurikulum Merdeka disetiap Jenjang

Secara umum, Kurikulum Merdeka menawarkan pendekatan yang relevan dan progresif sesuai dengan setiap jenjang pendidikan. Pada tingkat pendidikan dasar, fokusnya adalah pada penguatan dasar-dasar pembelajaran. Di tingkat menengah pertama, perhatian bergeser ke eksplorasi dan penguatan karakter siswa, sementara di tingkat menengah atas, orientasinya adalah pada persiapan masa depan dan pengambilan keputusan akademis.

Namun demikian, setiap jenjang pendidikan menghadapi tiga tantangan signifikan yang bersifat lintas jenjang: rendahnya pemahaman guru mengenai esensi pembelajaran yang berdiferensiasi, keterbatasan dalam hal sumber daya digital dan pelatihan, serta kurangnya sinergi antara para pemangku kepentingan pendidikan. Gunawan (2022) menekankan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada kepemimpinan transformatif kepala sekolah dan budaya kolaboratif di lingkungan satuan pendidikan.

Oleh karena itu, keberhasilan dalam menerapkan kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh kebijakan kurikulum itu sendiri, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut dihayati dan dilaksanakan oleh seluruh ekosistem sekolah. Proses klasifikasi/pengelompokan dalam hal implementasi Kurikulum Merdeka ini bertujuan untuk mempertajam serta memperjelas komponen-komponen apa saja yang telah diimplementasikan dari setiap jenjang pendidikan di Indonesia.

3. Evaluasi Terhadap Implementasi Kurikulum Merdeka diberbagai Jengjang Pendidikan

Evaluasi kurikulum bertujuan untuk menyediakan informasi dalam pelaksanaan kurikulum, penentu tingkat keberhasilan dan kegagalan kurikulum, mengembangkan berbagai macam alternatif penyelesaian masalah, memahami dan menjelaskan karakteristik pelaksanaan kurikulum (Syafaruddin & Amiruddin, 2017). Tahapan pelaksanaan evaluasi kurikulum dimulai dari tahap evaluasi reflektif, formatif, dan sumatif. Evaluasi reflektif dilakukan pada tahap awal saat dokumen kurikulum tersebut dikembangkan. Evaluasi Copyright (c) 2025 MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan



formatif dilakukan setelah pelaksanaan kurikulum secara terbatas atau penuh. Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah implementasi kurikulum secara penuh paling sedikit lima tahun. Kriteria yang digunakan untuk menerjemahkan dan menyimpulkan suatu data mencakup: kejelasan bahasa dan pikiran, cakupan komprehensif, kelayakan, koherensi, efisiensi, kenyamanan, keaslian, keterlibatan, efektivitas, keinklusifan, dan kesamaan (Syafaruddin & Amiruddin, 2017). Oleh karena itu, evaluasi kurikulum sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kurikulum dalam pendidikan.

Evaluasi dalam kurikulum apapun termasuk kurikulum merdeka belajar merupakan komponen terakhir dalam sistem pembelajaran. Evaluasi bukan saja berfungsi untuk melihat keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran, akan tetapi juga berfungsi sebagai umpan balik guru atas kinerja yang telah dilakukannya dalam proses pembelajaran. Melalui evaluasi dapat diketahui kekurangan dalam pemanfaatan berbagai komponen dalam pembelajaran. Kemudian dalam kurikulum merdeka belajar, pendidik diberikan keleluasaan dalam menentukan evaluasi yakni bisa di awal pembelajaran (evaluasi diagnostik kognitif atau non kognitif), selama proses pembelajaran (formatif) dan di akhir pembelajaran (sumatif). Begitu pula mengenai bentuk atau jenis evaluasi, dalam kurikulum merdeka belajar, pendidik diberikan keleluasaan (Kemendikbudristek, 2021).

Pentingnya evaluasi sebagaimana dijelaskan oleh Dja'far Siddik bahwa fungsi evaluasi adalah: a. intensif untuk meningkatkan peserta didik belajar, b. umpan balik bagi peserta didik, c. umpan balik bagi pendidik, d. informasi bagi orangtua/ wali, d. informasi untuk lembaga. Dengan adanya evaluasi dalam pembelajaran, sehingga guru akan mengetahui sejauh mana siswa dapat memahami materi yang disampaikan. Apabila dalam proses pembelajaran tidak ada evaluasi, maka guru, siswa, orangtua/ wali siswa, serta lembaga tidak akan mengetahui hasil yang diperoleh dari pembelajaran. Oleh karena itu, evaluasi sangatlah penting dalam proses belajar mengajar.

Evaluasi terhadap implementasi kurikulum saat ini, yaitu Kurikulum Merdeka (IKM), menunjukkan kebutuhan akan kesinambungan yang lebih komprehensif dan sederhana. Problematika utama yang dihadapi adalah kompleksitas esensi dan filosofi Kurikulum Merdeka yang memerlukan perubahan fundamental dalam cara pandang dan praktik pedagogis guru, bukan sekadar penyesuaian prosedural (Permana, 2023). Kesenjangan pemahaman ini terjadi di berbagai kalangan pendidik, baik senior maupun muda, yang kesulitan menerjemahkan prinsip-prinsip kurikulum ke dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari yang relevan dan efektif (Puspita, 2020). Oleh karena itu, evaluasi IKM harus mampu mengidentifikasi secara detail area-area ketidakpahaman guru dan menjadi dasar perancangan program pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif, relevan, dan mudah diakses, guna meningkatkan kapasitas guru dalam memahami dan menerapkan Kurikulum Merdeka secara optimal (Santoso & Aminah, 2023).

Untuk memastikan Kurikulum Merdeka dapat diaplikasikan secara efektif dan mencapai tujuan pembelajaran di setiap institusi pendidikan di Indonesia, peran pemerintah menjadi krusial dalam menyediakan ekosistem pendukung yang memadai. Pemerintah, termasuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dinas pendidikan di berbagai tingkatan, serta satuan pemerintahan terkait lainnya, bertanggung jawab menyediakan fasilitas yang menunjang kelancaran IKM. Ini mencakup pengembangan platform digital atau website yang lebih user-friendly dan intuitif sebagai sumber belajar dan berbagi praktik baik (Susilo, 2021), serta penyelenggaraan pelatihan guru secara berkala dan berkelanjutan yang difokuskan pada penguatan esensi dan penerapan praktis Kurikulum Merdeka. Tantangan kebijakan dan implementasi IKM seringkali berakar pada kurangnya dukungan infrastruktur dan sumber daya yang merata (Nurhayati, 2022). Oleh karena itu, kolaborasi antar pemangku kepentingan dan komitmen pemerintah dalam menyediakan sumber daya yang cukup dan mudah dijangkau



KESIMPULAN

Dari berbagai tinjauan yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kurikulum Merdeka sudah terlaksana akan tetapi menuai beberapa kendala yang perlu diselaraskan oleh berbagai pihak baik terutama dari parlemen pendidikan yang terdiri dari menteri pendidikan, dinas kependidikan dan instansi-institusi pendidikan lainnya yang harus memiliki keselarasan antara tujuan pendidikan yang sesuai dengan zaman dan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Karena diharapkan parlemen-parlemen pendidikan tidak hanya mengeluarkan kebijakan yang relevan tetapi juga mensupport dari keberhasilan kebijakan tersebut, jikalau tidak adanya support dari suatu kebijakan maka akan terjadinya suatu problem, seperti halnya kurang pemahaman guru terkait esensi dan implementasi kurikulum merdeka yang diakibatkan sedikitnya pelatihan intensif guru secara luring yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pendidik terhadap suatu kebijakan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmansyah, A., Sugilar, H., Ismail, I., & Warna, D. (2022). Fenomena pembelajaran daring: Dilihat dari perspektif fasilitas belajar, kurikulum, dan karakter siswa sekolah dasar. *Ilmu Pendidikan*, 12 (8), 508.
- Abdurrahmansyah, M. A. (2023). *Kajian Teoritik dan Implementatif Pengembangan Kurikulum*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 333-334.
- Cahyono, H., et al. (2022). Problematika implementasi kurikulum merdeka belajar di Sekolah Dasar. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 5(4), 1371–1378. <https://doi.org/10.31949/jee.v5i4.3708>
- Gunawan, H. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka: Tantangan dan Strategi dalam Mewujudkan Pembelajaran Berdiferensiasi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 27(1), 13–24. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v27i1.4031>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Pedoman implementasi Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan* (Nomor 056/H/PG.02/2023). <https://kurikulum.kemdikbud.go.id>
- Khoirurrijal, K., et al. (2022). *Pengembangan Kurikulum Merdeka*.
- Mulyasa, E. (2013). *Pengembangan dan implementasi kurikulum 2013*. Remaja Rosdakarya.
- Nurhadi, D. (2022). Desain Pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka: Perspektif Guru Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 13(1), 1–10.
- Nurhayati, E. (2022). Tantangan Kebijakan dan Implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 10(2), 112–128.
- Oktaria, K., et al. (2023). Implikasi Teori Belajar Behavioristik Thorndike dalam Pembelajaran PAI. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(8), 5555-5564.
- Permana, A. (2023). Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka dan Strategi Mengatasinya. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 15(1), 45–60.
- Puspita, R. (2020). Kesiapan Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 7(3), 210-225.
- Rachmawati, N., & Fadillah, R. (2023). Strategi Guru dalam Menerapkan Pembelajaran Proyek Profil Pelajar Pancasila. *Jurnal Inovasi Pendidikan Indonesia*, 5(3), 145–154.



- Santoso, B., & Aminah, S. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 14(1), 88-102.
- Sari, D. P., & Putra, A. (2023). Peran otonomi guru dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 45–58. <https://doi.org/contoh.doi.12345>
- Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. S. (2014). *Evaluation theory, models, and applications*. Jossey-Bass.
- Sudjana, N. (2011). *Penilaian hasil proses belajar mengajar*. Remaja Rosdakarya.
- Susilo, J. (2021). Pemanfaatan Platform Digital sebagai Sumber Belajar Implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 11(3), 180-195.
- Suyatno, & Fauziyah, S. (2023). Analisis Penerapan Kurikulum Merdeka pada Jenjang Pendidikan Dasar di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 42(2), 215–228.
- Syafaruddin, S., & Amiruddin, A. (2017). *Manajemen kurikulum*.
- Wulandari, R., & Salim, A. (2024). Stakeholder Collaboration in Merdeka Belajar Implementation: A Policy Analysis. *Journal of Educational Policy*, 8(1), 1-17.
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93–112. <https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>